



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan harus menunjukkan sumber karya tulis yang dikutip.
- b. Pengutipan tidak menimbulkan kesan pengutipan karya tulis yang dikutip.

2. Dilarang menggunakan karya tulis ini untuk tujuan komersial atau untuk tujuan lain tanpa mendapat persetujuan dari Universitas Riau.

Bab 4

Sistem Kepartaian dan Model Sistem Kepartaian di Asia Tenggara

Pendahuluan

Pelaksanaan pemilu di setiap negara demokrasi biasanya selalu diikuti oleh sejumlah partai politik. Adapun jumlah partai politik yang mengikuti pemilu di sebuah negara ada kalanya jumlahnya selalu berubah-ubah. Kestabilan jumlah partai politik yang hadir di setiap negara menunjukkan kestabilan sistem kepartaian di negara itu. Selain itu, sistem kepartaian merupakan cermin heterogenitas atau heterogenitas masyarakat sebuah negara, oleh karena itu negara yang masyarakatnya heterogen akan muncul sistem kepartaian multi partai, sedangkan dalam negara yang masyarakatnya homogen cenderung muncul sistem kepartaian dua partai. Adapun model kepartaian yang dipraktekkan di Indonesia, dari masa orde lama, orde baru dan reformasi, Indonesia juga memiliki perbedaan. Dalam bab ini akan memudahkan kita memahami model sistem kepartaian di Indonesia. Sehingga kita perlu mempelajari model-model sistem kepartaian yang dipraktekkan di negara-negara di asia tenggara yang memang memiliki sistem kepartaian yang mirip dengan Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merujuk ke sumber asli.

2. Dilarang menggunakan atau menyalin karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



Setelah mempelajari bab 4 ini, secara umum mahasiswa diharapkan memahami apa yang dimaksud dengan sistem kepartaian, model-model sistem kepartaian, dan model sistem kepartaian yang dipraktekan di negara-negara Asia Tenggara. Sedangkan secara khusus mahasiswa diharapkan dapat :

- Mengetahui definisi sistem kepartaian dan model-model sistem kepartaian yang dikemukakan para ahli.
- Mampu menjelaskan secara teoritik berbagai model sistem kepartaian yang dikemukakan para ahli.
- Mengetahui dan memahami factor penyebab terjadinya sistem kepartaian tertentu di negara Asia Tenggara.
- Mampu menjelaskan dan menganalisa model-model sistem kepartaian yang pernah berlaku di sepanjang sejarah negara Indonesia.

B. Sistem Kepartaian dan Model Sistem Kepartaian

Menurut Dieter Nohlen dan Elmar Wiesendhal, sistem kepartaian dipahami sebagai keseluruhan struktur susunan partai-partai politik di suatu negara. Indikator melihat sistem kepartaian adalah : 1) Jumlah partai politik yang ada; 2) Derajat fragmentasi atau pengelompokan partai-partai politik yang ada; 3) Hubungan ideologis atau derajat polarisasi; 4) Pola interaksi antar partai politik berupa koalisi maupun oposisi; 5) Hubungan partai dengan masyarakat; 6) Posisi partai politik terhadap sistem politik yang ada, apakah sebagai pendukung atau tidak; 7) Derajat kelembagaan sistem kepartaian atau stabilnya kehadiran partai politik dalam setiap pemilu di sebuah negara.

Lebih jauh Mair (1996) mengemukakan model-model sistem kepartaian yang diungkapkan para ahli, berdasarkan kriteria tertentu yang mana dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum tentang masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.

2. Dilarang memperbanyak atau memperjualbelikan karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Tabel 2 : Model-Model Sistem Kepartaian

| Penemu | Prinsip-Kriteria Klasifikasi | Tipe Sistem Kepartaian yang Teridentifikasi |
|-----------------|--|---|
| Duverger (1954) | Jumlah Partai | 1. Sistem dua partai 2. Sistem multi partai. |
| Dahl (1966) | Tingkat kompetisi dalam berposisi | 1. Kompetisi kuat 2. Kooperatif—kompetisi 3. Koalisi—kompetisi 4. Koalisi kuat |
| Blondel (1968) | Jumlah dan ukuran relatif partai politik | 1. Sistem dua partai. 2. Sistem dua partai dan beberapa partai kecil. 3. Sistem multi partai dengan satu partai dominan. 4. Sistem multi partai tanpa partai dominan |

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa Duverger (1954) menjelaskan tipe sistem kepartaian berdasarkan kriteria jumlah partai politik di sebuah negara, sehingga ia menemukan dua tipe sistem kepartaian yakni sistem dua partai dan sistem multi partai. Kemudian Blondel menjelaskan sistem kepartaian dengan kriteria jumlah partai politik dan ukuran relatifnya dalam sebuah negara, sehingga ia mengemukakan empat tipe sistem kepartaian, yakni sistem dua partai, sistem dua partai dan beberapa partai kecil, sistem multi partai dengan satu partai dominan dan sistem multipartai tanpa partai dominan. Berbeda dengan Duverger dan Blondel, Dahl membedakan sistem kepartaian berdasarkan tingkat kompetisi dalam berposisi, sehingga mengemukakan sistem kepartaian dengan kompetisi kuat, kooperatif-kompetisi, koalisi-kompetisi dan koalisi kuat.

Sistem Kepartaian di Asia Tenggara

Berdasarkan data FES (2002), maka model sistem kepartaian di beberapa negara asia tenggara dapat dilihat pada berikut ini:



Tabel 3 : Sistem Kepartaian dan Sistem Politik Beberapa Negara Asia Tenggara

| No | Nama Negara | Sistem Kepartaian | Siatem Politik |
|----|-------------|-------------------|----------------|
| 1 | Kamboja | Multi Partai | Non Demokrasi |
| 2 | Malaysia | Multi partai | Semi demokrasi |
| 3 | Singapura | Multi Partai | Semi demokrasi |
| 4 | Philipina | Multi Partai | Demokrasi |
| 5 | Thailand | Multi partai | Demokrasi |

Data di tabel 3 tersebut menunjukkan bahwa semua negara tersebut walaupun memiliki model sistem politik yang berbeda namun memiliki model sistem kepartaian yang sama, yakni multi partai. Munculnya sistem kepartaian di negara-negara Asia tenggara tidak bisa dilepaskan dari heterogenitas masyarakat yang tinggi dalam sebuah negara. Semakin heterogen sebuah masyarakat, semakin besar peluang lahirnya sistem kepartaian multi partai di negara tersebut. Malaysia misalnya di huni oleh tiga etnis besar yakni Melayu, China dan India yang masing-masing bersaing untuk berkuasa di bidang politik, sehingga memicu tiga etnis tersebut untuk mendirikan partai politik untuk memperjuangkan kepentingan politik etnisnya dalam pembuatan kebijakan pemerintahan nasional maupun lokal.

Berdasarkan tabel 3 di atas juga dapat dilihat bahwa ada tiga negara memiliki sistem politik yang kurang demokratis, yakni Singapura, Malaysia dan Kamboja, serta ada dua negara memiliki sistem politik yang demokrasi yakni Philipina dan Thailand. Menurut Alan Watanabe ada bebebrapa ciri sistem kepartaian di negara non demokrasi, yakni : 1) Kompetisi antar partai dalam pemilu berupa kompetisi semu; 2) Sebagian besar partai menggunakan teknik mobilisasi dalam meraih dukungan; 3) Adakalanya partai bergabung dengan organisasi lain, misalnya militer; 4) terdapat partai dominan dapat membatasi aktivitas partai lainnya; 5) sistem kepartaian biasanya didasarkan ideologi. Selain itu, Almond (1996) juga mengemukakan ciri sistem kepartaian non kompetitif (non demokrasi/ kompetisi semu), yakni: 1) Tidak ada



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan umum tentang masalah.
 - b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan.
2. Dilarang mempergunakan sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



kompetisi antar partai yang berarti dalam pemilu; 2) Koorporasi partai politik—ada satu partai yang terlalu mendominasi partai lainnya; 3) rezim militer yang kadang kala bekerjasama dengan partai dominan.

Berdasarkan literatur setidaknya ada dua bentuk sistem kepartaian yang biasanya khas di negara dunia ketiga :

1. Multi Partai tidak Stabil. Menurut Giovanni Sartori, dalam sistem multi partai tidak stabil, partai politik lebih merupakan faksi di tengah masyarakat, partai politik tidak memandang dirinya bagian dari sistem yang disepakati bersama, tetapi cenderung bertindak sendiri berdasarkan ideologi yang sempit.
2. Multi partai dengan satu Partai Dominan. Menurut Konsoulas, partai politik dominan dalam sistem politik ini mempunyai peran, yakni : 1) Alat efektif untuk melakukan sosialisasi politik mendukung pemerintahan; 2) Alat utama pendukung integrasi nasional; 3) alat pendukung modernisasi ekonomi; 4) Meligitimasi pemerintahan berkuasa; 5) Menekan partai yang menjadi saingan, agar tetap menjadi partai dominan dalam sistem politik.

Aplikasi Sistem Kepartaian di Asia Tenggara

1. Kamboja.

Sistem politik di Kamboja dinilai tidak demokrasi, disebabkan adanya intervensi militer dibidang politik. Menurut Kessie Neou di Kamboja tahun 1993 terjadi koalisi partai politik yang diwarnai intervensi militer terhadap partai politik. Ada tiga partai politik di Kamboja, yakni CPP (*Cambodian People Party*), Funcipec (*Front Uni National Four un Canbodge Independent, Neutre, Pecifique, Cooperatif*) dan SRP (*Sam Rainsy Party*). Sistem pemilu yang berlaku di setiap daerah pemilihan, yang selalu membuka munculnya partai-partai kepartaian multi partai. Partai-partai politik yang ada tidak dapat bekerja sama dalam sebuah koalisi yang stabil. Di tahun 1993,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak diperkenankan untuk diperjualbelikan.

2.



terjadi koalisi pemerintahan antara partai Funcinpec (45%) dan CPP (38%). Walaupun, CPP pimpinan Hunsen bukan partai pemenang pemilu, namun dalam menjalankan pemerintahan CPP lebih berpelembuh dan mendapat dukungan dari pihak militer dibandingkan Funcipec. Ketika terjadi konflik antara Funcipec dan CPP, militer mendukung CPP dan memaksa Funcipec keluar dari pemerintahan dan menjadi partai oposisi. Kemudian pada Pemilu 1998, CPP keluar sebagai pemenang pemilu dengan perolehan suara sebesar 41%, Funcipec sebanyak 37% dan SRP sebesar 14%. Disebabkan tidak ada partai mayoritas, CPP dan Funcipec kembali berkoalisi dalam pemerintahan.

2. Malaysia

Sistem politik di Malaysia adalah semu demokrasi yang diwarnainya ditandai tidak adanya kompetisi yang jujur dan adil dalam pemilu. Menurut Lim Hong Hai (2002), sistem kepartaian di Malaysia adalah sistem multi partai dan sampai Pemilu 1999, ada dua koalisi partai politik, yakni koalisi partai memerintah yang dinamakan Barisan Nasional (UMNO, MCA dan beberapa partai kecil) dan koalisi partai oposisi yang terdiri dari PAS, DAP, dan beberapa partai kecil lainnya. Koalisi Partai pemerintah selalu berusaha melakukan tindakan non demokratis agar partai oposisi tidak berkembang dengan cara :1) Membuat aturan sistem pemilu *Plurality Single Member District (PSMD)*—menguntungkan partai besar (berkuasa); 2) Mempengaruhi lembaga penyelenggara pemilu agar tidak memproses protes kelompok oposisi; 3) Melakukan kampanye negatif—fitnah terhadap partai koalisi; 4) Ada tuduhan Kelompok oposisi bahwa partai berkuasa merekayasa jumlah pemilih, serta melakukan berbagai kecurangan dalam pelaksanaan pemilu. Walaupun demikian, partai oposisi tetap berpartisipasi dalam pemilu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan tesis atau sejenisnya, dengan mencantumkan sumber kutipan.
- b. Pengutipan untuk tujuan menguntungkan atau dengan cara lain.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

3. Singapura

Sistem politik di Singapura juga semu demokrasi dengan ditandai adanya praktek-praktek politik yang non demokratis yang dilakukan oleh satu partai dominan bekerjasama dengan pemerintah. Menurut Yeo Lay Hwee, sistem kepartaian di Singapura adalah sistem multi partai dengan satu partai dominan yakni Partai Aksi (PAP). Dalam setiap pemilu PAP selalu mayoritas ($> 50\%$) mengalahkan partai SDP, PSP, PPS dan lain-lain. Singapura memakai sistem pemilu Plurality-PR yang tentunya akan menguntungkan partai politik yang dominan. Ada beberapa faktor yang membuat PAP selalu mendapat kemenangan dalam Pemilu di Singapura, yakni : 1) Mampu memediasi perbedaan dan kepentingan; 2) Selama PAP memerintah ekonomi maju pesat dan pelayanan dan kehidupan sosial makin baik; 3) Pimpinan PAP tidak korup dan melakukan pelayanan publik dengan baik; 4) Kebijakan paksaan koersif terhadap oposisi tidak diperlihatkan; 5) Interensi dan penangkapan oposisi oleh pihak keamanan Singapura; 6) Mengawasi pemerintahan PAP terhadap media massa; 7) Pemberaian rumah dan Apartemen bagi pemilih PAP oleh pemerintah; 8) Peme-rintahan PAP, Mengawasi diskusi politik tentang partai politik; 9) Mengawasi semua organisasi dan kelompok kepentingan oleh peme-rintahan PAP; 10) Memberikan nomor seri pada kertas suara, sehingga pemilih partai oposisi diketahui oleh pemerintah.

4. Philipina

Sistem politik di Philipina lebih demokratis dengan sistem ke-partaian multi partai dan terjadi kompetisi antar partai politik yang berarti dalam pemilu. Menurut Julio Teehankee (2002) di sistem kepartaian multipartai yg kompetitif berlangsung di Philipina, termasuk pemilu legislatif tahun 2001. Sebagai hasil pemilu tahun 2001 terbentuk terbentuk dua koalisi besar, yakni koalisi partai mem-ber yang terdiri dari partai Lakas NUCD-UMPD, LP, Reforma

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak isi buku ini untuk apa pun bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.



LM dan lain-lain, sedangkan koalisi partai oposisi terdiri dari partai LDP dan LAMMP. Persaingan antar partai politik dalam pemilu tetap memungkinkan partai-partai politik di Philipina untuk berkoalisi. Walaupun menggunakan sistem pemilu FPTP, yang sebenarnya menguntungkan partai besar namun partai-partai kecil tetap mendapatkan suara, sebab mereka mengambil penguasa-penguasa lokal yang berpengaruh untuk menjadi calon legislatifnya. Pemanfaatan penguasa lokal sebagai calon legislatif oleh partai-partai politik semakin memperkuat politik dynasty yang telah terjadi di Philipina selama ini.

5. Thailand.

Sistem politik di Thailand cukup demokratis, namun menghasilkan sistem multi partai yang tidak stabil. Menurut Orathai Kockpol pemerintahan di Thailand disusun berdasarkan koalisi partai-partai tidak stabil yang ditandai dengan terjadinya 2 kali pergantian Perdana Menteri dan 3 kali *reshuffle* kabinet sejak tahun 1995 sampai dengan tahun 2001. Misalnya Perdana Menteri Taksin Shinawatra dari *thai rakchai* sering terlihat tidak mau berkompromi dengan koalisinya di parlemen, akibatnya partai-partai koalisi menarik dukungan sehingga menyebabkan kabinet menjadi jatuh. Selain itu, kekuatan masyarakat sipil sangat kuat di Thailand bahkan kekuatan ini tidak jarang mampu mengalahkan peran pemerintah dan partai politik.

E. Rangkuman

Sistem kepartaian didefinisikan sebagai keluruhan struktur partai politik yang ada di sebuah negara. Klasifikasi sistem kepartaian secara umum dibedakan berdasarkan jumlah partai politik dan ukuran relatifnya pada sebuah negara. Jenis sistem kepartaian antara lain : dua partai, dua partai dengan beberapa partai kecil, multi partai dengan satu partai dominan dan multi partai tanpa partai dominan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Soal Latihan

2. Secara umum di negara-negara asia tenggara, muncul sistem kepartaian multi partai tanpa partai dominan seperti di Kamboja, Malaysia, Philipina, Thailand dan multi partai dengan satu partai dominan di Singapura.

Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel dan Powell, Bingham Jr. 1996. *Comparative Politics Today : A World View*, Harper Collins College Publisher.
- Parto, widjaja, PR & Kusumah MW (2003). *Kisah Mini Sistem Kepartaian*. ———: Closs
- Pratt, FE (2002). *Electoral Politics in Southeast an East Asia*. Singapore: South East Printing Pte Ltd.
- Pratt, RH (1996). *The politics of elections in Southeast Asia*. USA Woodrow Wilson Center and Cambridge.
- Pratt, Alan (1996). *Political Parties and party Sistem*. Britain : Oxford University Press.

